

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor.¹ Kata "bioskop" berasal dari bahasa Belanda bioscoop yang berakar dari bahasa Yunani; βίος (bios) yang artinya "hidup" dan σκοπος (skopos) yang artinya "melihat".² Di bioskop, penonton fokus pada gambar hidup yang ditampilkan di layar lebar. Kualitas efek dan kejernihan suara program film sangat dipengaruhi oleh sistem suara bioskop. Faktor-faktor seperti tata letak bangunan, pemilihan material yang tepat, dan akustik bangunan berperan penting dalam mencapai kualitas visual yang optimal.³

Bioskop telah menjadi bagian integral dari kehidupan Indonesia selama lebih dari satu abad. Sejak kelahirannya pada akhir tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an, bioskop telah menghadirkan beragam film yang menghibur, mendidik, dan menginspirasi. Bioskop tidak hanya menjadi tempat hiburan, namun juga

¹ Dara Bunga Rembulan, "Kedudukan Ruang Bioskop Sebagai Media Apresiasi Film", *Jurnal Seni Media Rekam*, Vol. 3 No. 1, (2011), hlm. 40.

² *Ibid*



Bella Mukalafitri dan M. Fauzi Djamal, "Pengaruh Brand Activation CGV Melalui Instagram Terhadap Loyalitas Penonton Bioskop Di Masa", *Inter Script: Journal of Creative Communication*, Vol. 5 No. 2, (2023),

mencerminkan perkembangan sosial, budaya, dan politik suatu negara. Bioskop merupakan tempat dimana penonton dapat menikmati film dengan kualitas gambar dan suara yang optimal. Saat itu, film pertama diputar di bioskop dan auditorium.

Namun seiring berkembangnya teknologi, bioskop-bioskop independen mulai bermunculan. Bioskop pertama kali dikenal oleh masyarakat Indonesia pada 5 Desember 1900. Saat itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Acara pemutaran film yang biasa disebut “gambar idoe” dilakukan di Lapangan Pasar Gambir (sekarang dikenal sebagai Monas). Film yang pertama kali diputar adalah film dokumenter tentang Raja dan Ratu Belanda, yang masih bisu dan belum memiliki dialog. Bioskop ini didirikan oleh pengusaha Belanda bernama Talbot. Harga tiket saat itu dibagi menjadi tiga kelas: kelas 1 dengan harga dua gulden, kelas 2 seharga satu gulden, dan kelas 3 seharga setengah gulden. Selain itu, ada juga bioskop lain yang didirikan oleh Schwarz di Kebon Jahe, Tanah Abang.⁴

Sejak saat itu, beberapa bioskop mulai bermunculan di Jakarta dan kemudian di Bandung pada tahun 1905. Film-film impor dari Amerika dan Eropa masuk ke Indonesia, dan bioskop-bioskop telah menayangkan film yang bisa bicara. Kemudian,



Pramana Jati, “Sejarah Perkembangan Bioskop di Indonesia: Dari ‘Gambar ingga ‘Sinepleks’ ”, <https://sediksi.com/sejarah-perkembangan-bioskop-di-/> diakses pada 18 Juli 2024 pukul 05:56 WITA.

pada tahun 1916, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur peredaran film serta penyelenggaraan izin usaha bioskop melalui Ordonansi Bioscope.⁵

Bioskop tidak hanya menjadi tempat menonton film, namun juga pusat hiburan. Bioskop juga berupaya memperkenalkan film nasional dan internasional kepada masyarakat. Di Indonesia, bioskop telah menjadi bagian penting dari budaya hiburan. Pada awalnya bioskop hanya terdapat di kota-kota besar, namun seiring berjalannya waktu menyebar ke berbagai daerah. Bioskop adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang menonton film bersama teman dan keluarga.

Pada perkembangan selanjutnya bioskop merambat ke berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Makassar. Pada tahun 1950-an tempat hiburan di Kota Makassar semakin meningkat. Meningkatnya jumlah tempat hiburan ini salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah urbanisasi dari daerah ke kota. Sebagai kota terbesar kedua di luar Pulau Jawa, Kota Makassar telah dilengkapi dengan beragam jenis tempat hiburan, salah satunya adalah Bioskop.⁶ Kegiatan modern terus berkembang, salah satunya adalah aspek hiburan. Di tengah gejolak politik di Sulawesi Selatan, Kota Makassar tak henti-hentinya didatangi tempat-tempat hiburan. Ruang kota kemudian menjadi arena di mana berbagai hal baru

⁵ Widya Lestari Ningsih & Nibras Nada Nailufar, “Sejarah Bioskop di Indonesia”, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/14/104424179/sejarah-bioskop-di-indonesia> diakses pada 18 Juli 2024 pukul 07:15 WITA.



Ilham Daeng Makkelo, “Antara Modernitas dan Menjadi Indonesia : Budaya di Kota Makassar Tahun 1950-an”, dalam Dias Pradadimara, Bahar Akkasey Kusuma Tarupay (editor), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di 1950-an*. (Yogyakarta : PT. Kanisius, 2014), hlm. 87.

dihadirkan dan dirayakan, seperti bioskop yang merupakan ruang penting bagi hiburan modern dan perkotaan pada tahun 1950-an.⁷

Sebelumnya, beberapa bioskop sudah ada di Kota Makassar sebagai pusat hiburan kota untuk kalangan Eropa pada tahun 1930an, diantaranya ialah Bioskop Luxor, Bioskop de Ster dan Bioskop Sintje.⁸ Kemudian, memasuki tahun 1950an terdapat tiga belas bioskop yang cukup terkenal di Kota Makassar, yakni; Bioskop Capitol, Bioskop Alhambra, Bioskop City, Bioskop Cathy, Bioskop Empress, Bioskop Sirine, Bioskop Taman Gembira, Bioskop Murni, Bioskop Nam Seng, Bioskop Sin Kong, Bioskop Asmara, Bioskop Roxy, dan Bioskop Sempurna.⁹ Sejumlah gedung bioskop tersebut memutar film Amerika, Melayu, India, Cina, dan Indonesia.

Bioskop pada awalnya hanya dapat diakses oleh kalangan elite, seperti warga Belanda, pejabat, dan kelompok masyarakat dengan status sosial tinggi. Hal ini mencerminkan struktur sosial pada masa kolonial Hindia-Belanda, di mana pembagian kelas dalam bioskop didasarkan pada perbedaan ras antara orang Eropa

⁷ *Ibid*, hlm. 82.

⁸ Bella Astari Patta, *Ambtenaar Bumiputera di Kota Makassar Tahun 1906-1942*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2023), hlm. 48.



⁹ Ilham Daeng Makkelo. “Menolak Kolonialisme, Membayangkan Barat. n Film di Bioskop di Kota Makassar Tahun 1950-an”. *Prosiding Seminar*. iversity, 2011.

dan masyarakat pribumi (Inlander).¹⁰ sistem pengelompokan penonton mulai membedakan antara militer dan masyarakat umum, termasuk dalam jenis film yang diputar, dan berlangsung hingga akhir abad ke-20. Hingga saat ini, sistem pengelompokan tiket di bioskop masih diterapkan dengan variasi harga yang disesuaikan berdasarkan perbedaan fasilitas yang ditawarkan.

Fasilitas perkotaan mulai dikembangkan, salah satunya fasilitas hiburan yang ditandai dengan berdirinya bioskop. Hiburan mulai berkembang di Makassar dengan lahirnya perkumpulan dan maraknya ruang pertunjukan, yang mendukung tumbuhnya kehidupan dan gaya hidup seni dan budaya. Bioskop di Kota Makassar menjadi bertambah, pada periode 1970 hingga 1990 mencapai puncak kejayaannya dengan jumlah bioskop mencapai 25 gedung. Pada periode tersebut, kelas-kelas bioskop juga tercipta dengan jenis film yang diputar, sehingga muncul bioskop yang khusus memutar Film India, Film Barat, Film Hongkong maupun Film Mandarin, serta Film Indonesia tentunya.¹¹

Pada tahun 1977, Pemerintah Kota Makassar menetapkan klasifikasi dan harga tiket bioskop melalui Surat Keputusan Wali Kota Makassar No. 299/S.Kep/71/77 tanggal 22 November 1977, yang membagi bioskop menjadi lima golongan. Pertama, golongan I/A atau golongan yang paling utama. Bioskop yang



¹⁰ Ilyas Ibrahim Husain, “Bioskop di Kota Makassar”, laliterasi.com/2018/02/13/bioskop-di-kota-makassar/ diakses pada 19 Juli ul 06:12 WITA.

Ibid

masuk dalam golongan ini adalah Bioskop Artis dengan harga tiket masuk dibandrol Rp. 300-1.000. Kedua, golongan I/B. Bioskop yang masuk kategori ini ialah Bioskop Madya, Bioskop Istana, Bioskop Dewi, Bioskop Benteng, Bioskop Ratu, Bioskop Anda, dan Bioskop Arini yang harga tiket masuknya berkisar antara Rp. 300-750. Ketiga, golongan II/A. Bioskop yang masuk dalam golongan ini adalah Bioskop Jumpandang dan Bioskop Mutiara dengan HTM (Harga Tiket Masuk) berkisar antara Rp. 200-500. Keempat, golongan II/B dengan Bioskop Jaya dan Bioskop Apollo, adapun harga tiket masuk berkisar Rp. 200-500. Dan terakhir, golongan III yang meliputi Bioskop Surya, Bioskop Kolam Renang, Bioskop Mesra, Bioskop Pelita, Bioskop D.K.M dan Bioskop Jalaria dengan HTM berkisar antara Rp. 100-200.¹²

Di Kota Makassar, bioskop telah menjadi tempat hiburan dan kenangan bagi warga. Setiap bioskop memiliki cerita dan peran khusus dalam sejarah hiburan lokal.¹³ Beberapa bioskop yang pernah berdiri di kota ini. Sebelum mal merajalela, bioskop-bioskop berdiri sendiri di beberapa lokasi kota ini. Beberapa di antaranya adalah Bioskop Madya yang terletak di Jalan Kajaolalido, di sini diputar film-film seperti Warkop DKI, Saur Sepuh, dan Mahkota Mayangkara. Saat ini, lokasi Bioskop Madya telah beralih fungsi menjadi bank swasta. Bioskop Dewi, bioskop ini terkenal

¹² Rahmatia M, Bioskop di Kotamadya Ujung Pandang (1971-1999), Skripsi, (Makassar: FIS UNM, 2015), hlm. 25-26.



Salsabilah Azzahra Makka, “10 Film Bugis-Makassar yang Kental dengan Lokal”, <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6601429/10-film-bugis-yang-kental-dengan-kearifan-lokal> diakses pada 19 Juli 2024 pukul 07:18

karena sering memutar film-film romantis India. Berlokasi di perempatan Jalan Andalas dan Jalan Mesjid Raya. Bioskop Arini terletak di Jalan Rusa, Arini Theater menjadi tempat favorit warga untuk menonton film nasional, seperti “Adikku Kekasihku”. Bioskop Artist berada dekat dengan Mal MTC, Bioskop Artist menjadi tujuan hiburan para anak SMA. Dan Bioskop Istana, Bioskop ini memiliki fasilitas sederhana dengan kursi rotan.¹⁴

Bioskop Dewi merupakan salah satu bioskop ternama di Kota Makassar dan menjadi ikon hiburan modern yang mencerminkan perkembangan gaya hidup masyarakat urban.¹⁵ Bioskop Dewi dikenal luas oleh masyarakat Kota Makassar karena sering memutar film-film India, menjadikannya salah satu bioskop favorit pada masanya. Pada periode 1960-an, bioskop ini mulai menunjukkan perkembangan signifikan dengan menayangkan film asing, seperti film India dan Barat, yang sesekali diselingi dengan film lokal. Memasuki dekade 1970-an hingga 1980-an, film-film India diputar secara lebih rutin dan menjadi ciri khas utama bioskop ini. Namun, pada 1990-an, terjadi penurunan jumlah penonton, sehingga Bioskop Dewi lebih sering menayangkan film lokal untuk menyesuaikan selera pasar saat itu.¹⁶

¹⁴ Nilam Indahsari, “5 Lokasi yang Jadi Gedung Bioskop Tahun ’80/’90-an di Makassar”, <https://gosulsel.com/2015/11/03/5-lokasi-yang-jadi-gedung-bioskop-80-90-an-hingga-90-an/> diakses pada 19 Juli 2024 pukul 07:30 WITA.

Ibid

Wawancara: Nanu Rewa, Kota Makassar, 16 Juli 2024.



Bioskop Dewi yang didirikan di perempatan Jalan Andalas dan Jalan Mesjid Raya tepatnya Jalan Bulusaraung, dimiliki oleh JAP JAM CHIAM (Anwar Yapari) akrab disapa Yapari, beliau seorang pengusaha yang berasal dari Tionghoa. Karena pada masa itu masyarakat butuh ruang hiburan, maka dibangunlah Bioskop ini dengan tujuan untuk menjadikan sarana hiburan bagi masyarakat Kota Makassar.¹⁷ Kehadiran Bioskop Dewi di Kota Makassar pada tahun 1948 menjadi daya tarik baru bagi masyarakat dalam menikmati tontonan film setelah kemerdekaan. Awal kehadiran Bioskop Dewi tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama situasi keamanan yang belum stabil akibat pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan pada awal 1950-an dan kebijakan pemerintah saat itu yang cenderung membatasi segala hal yang dianggap berbau kebarat-baratan, termasuk film asing.

Bioskop Dewi memiliki sejarah panjang yang diawali dengan perubahan nama dan proses pergantian kepemilikan, sebelum akhirnya dikenal luas oleh masyarakat dan mencapai masa kejayaannya pada periode 1965 hingga 1995. Sebelumnya, bioskop ini dikenal sebagai Bioskop City (City Theater), yang pada masanya secara eksklusif menayangkan film-film Barat. Pada tahun 1970-an, kepemilikan penuh gedung Bioskop Dewi berpindah kepada seorang pengusaha keturunan India bernama Tuan Rama, yang sebelumnya merupakan pemegang



Wawancara: Nanu Rewa, Kota Makassar, 16 Juli 2024.

sepertiga saham di Bioskop City. Selain Bioskop Dewi, ia juga memiliki dua bioskop lainnya, yaitu Bioskop Paramount dan Bioskop Jaya.¹⁸

Pada era 1960-an menandai masa kebangkitan setelah melewati berbagai polemik sebelumnya. Ciri khas bioskop ini terletak pada pemutaran film-film India, yang tidak terlepas dari latar belakang kepemilikan oleh seorang pengusaha keturunan India. Nama bioskop "Dewi" didasari oleh pemiliknya yang berasal dari keturunan India, dimana kata "Dewi" memiliki nuansa budaya yang berkaitan dengan tradisi India, namun tetap mencerminkan identitas lokal dan tidak mengandung unsur kebaratan. Dengan kekhasan tersebut, Bioskop Dewi berhasil menjadi salah satu tempat hiburan favorit di kalangan masyarakat Kota Makassar.

Sewaktu masa peralihan kepemilikan penuh pada dekade 1970-an hingga 1980-an, minat masyarakat untuk menonton di Bioskop Dewi mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh semakin rutinnya pemutaran film-film India yang populer pada masa itu, yang berhasil menarik perhatian penonton. Selain itu, pada periode yang sama, dibangun pula sebuah bioskop baru di sebelahnya, yaitu Bioskop Paramount, yang turut memperkuat kawasan tersebut sebagai pusat hiburan film di Kota Makassar.

Sampai dekade 1990-an, Bioskop Dewi mengalami kemunduran hingga akhirnya berhenti beroperasi. Penutupan resmi terjadi pada tahun 1995, dipengaruhi

bagai faktor yang saling berkaitan. Di antaranya adalah dominasi jaringan



Wawancara: Niki, Kota Makassar, 09 Mei 2025.

bioskop 21 yang memonopoli distribusi film asing, tingginya beban pajak tontonan, serta perubahan pola konsumsi hiburan masyarakat yang mulai beralih ke VCD dan CD.¹⁹ Kondisi ini menyebabkan pengelola Bioskop Dewi kesulitan bersaing dan akhirnya memutuskan untuk menjual gedung bioskop tersebut. Kini gedung tersebut menjadi deretan ruko elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah Bioskop Dewi Kota Makassar, mulai dari awal kejayaan bioskop, hingga gedung bioskop tidak lagi beroperasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah. Dalam mendapatkan data penelitian tidak lepas dari metode sejarah lisan yaitu dengan melalui teknik wawancara dan dilengkapi dengan dokumen berupa arsip sebagai pendukung keabsahan dari penelitian ini.

Dengan memahami sejarah Bioskop Dewi di Kota Makassar, kita dapat memahami bagaimana industri hiburan telah berkembang di Indonesia dan bagaimana perkembangan Kota Makassar seperti dibangunnya bioskop dapat membantu menambah pusat hiburan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang sejarah bioskop di Indonesia dan peran penting bioskop sebagai perkembangan kota.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian, rumusan masalah adalah pernyataan yang merangkum dan ibarkan masalah yang diteliti. Rumusan masalah ini berfungsi sebagai



Wawancara: Nanu Rewa, Kota Makassar, 16 Juli 2024.

panduan dalam penelitian dan membantu peneliti untuk tetap fokus pada tujuan penelitian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan Bioskop Dewi di Kota Makassar begitu dikenal dan diminati oleh masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh dari keberadaan Bioskop Dewi Kota Makassar terhadap masyarakat

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian adalah penentuan ruang lingkup atau area spesifik yang akan diteliti. Batasan ini penting untuk memastikan bahwa penelitian tetap fokus dan terorganisir. Batasan masalah biasanya mencakup aspek-aspek seperti Batasan Spasial dan Batasan Temporal. Dengan menentukan batasan masalah, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka tetap fokus dan relevan, serta dapat menghasilkan temuan yang bermakna dan dapat diandalkan.

1.3.1. Batasan Spasial

Penelitian ini akan difokuskan pada Bioskop Dewi yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membatasi ruang lingkup geografisnya pada kota Makassar dan provinsi Sulawesi Selatan.



3.2. Batasan Temporal

Dari segi waktu, penelitian ini akan difokuskan pada periode dari tahun 1965 hingga 1995. Hal ini mencakup pembahasan tentang awal berdirinya bioskop, mencakup ketika bioskop ini menjadi pusat hiburan. Penelitian ini juga akan membahas tentang perkembangan bioskop dari masa kejayaannya sampai penutupannya.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan perkembangan Bioskop Dewi di Kota Makassar pada tahun 1965-1995.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadikan Bioskop Dewi sebagai salah satu tempat hiburan modern yang dikenal luas oleh masyarakat Kota Makassar.
3. Menganalisis dampak dari munculnya dan hilangnya Bioskop Dewi Kota Makassar.

1.5. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada pemahaman sejarah bioskop di Indonesia.



Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pelajaran berharga bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dunia hiburan.

3. Temuan dan temuan potensial dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang, budaya, atau kebijakan publik.
4. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan literasi sejarah di kalangan masyarakat umum.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan berhubungan langsung dengan topik penelitian yang sedang Anda lakukan. Penelitian relevan dapat memberikan wawasan, data, metodologi, atau temuan yang dapat membantu dalam penelitian ini.

Dalam tulisan Rahmatia M (2015) berjudul *Bioskop di Kotamadya Ujung Pandang (1971-1999)*. Menjelaskan bahwa Bioskop di Kotamadya Ujung Pandang telah ada sejak awal abad ke-20, ketika masih di bawah penguasaan orang Belanda. Pada masa itu, bioskop menjadi tempat hiburan yang diikuti oleh orang Cina sebagai suatu kebanggaan untuk menyambut orang-orang Belanda. Dalam tulisan ini juga mencakup latar belakang berdirinya bioskop di Kota Makassar pada masa KotaMadya Ujung Pandang (KMUP), proses perkembangan dan peran bioskop pada periode tersebut.



Kemudian penelitian Haris Jauhari, "*Layar Perak: 90 Tahun Bioskop di*
1. Buku ini mencakup sejarah bioskop, jumlah penonton, industri film, dan

peran bioskop dalam hiburan.²⁰ Dalam konteks sejarah bioskop di Indonesia telah dibahas dalam buku ini, mulai dari awal kemunculannya sampai tahun 1991. Uraian dilakukan secara umum, tanpa menjelaskan terperinci tiap daerah di Indonesia.

1.6.2. Landasan Konseptual

Bioskop adalah tempat di mana masyarakat dapat menikmati pertunjukan film. Di sini, penonton mencurahkan perhatiannya dan menikmati gambar bergerak yang diproyeksikan di layar lebar. Bioskop merupakan wadah untuk menghadirkan pengalaman sinematik kepada penonton, dan menjadi tempat di mana cerita-cerita dari berbagai genre dapat dinikmati bersama.²¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992, Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar. Film dibuat berdasarkan asas sinematografi dan direkam menggunakan pita seloloid, pita video, piringan video, atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran. Film dapat dipertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan lainnya, dengan atau tanpa suara.



Haris Jauhari, *Layar Perak: 90 Tahun Bioskop di Indonesia*, (Jakarta: 1, 1992).

Bella dan Fauzi, *Pengaruh Brand.....*, hlm. 15

Menurut Wibowo, film adalah alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak umum melalui media cerita. Film juga dapat diartikan sebagai media ekspresi artistik bagi para seniman dan insan perfilman untuk mengungkapkan gagasan dan ide cerita yang dimilikinya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bioskop adalah tempat di mana penonton dapat menikmati film dengan pengalaman sinematik yang unik. Dengan, penonton duduk di ruangan gelap dan fokus pada layar lebar yang memproyeksikan gambar bergerak.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data dan interpretasi teks untuk menemukan makna dan wawasan tentang peristiwa Bioskop Dewi. Penelitian ini akan menggunakan desain studi kasus, dengan Bioskop Dewi di Kota Makassar sebagai kasus yang diteliti. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam tentang kasus tertentu.

Kemudian dilakukan pengumpulan data melalui berbagai sumber, termasuk menganalisis dokumen historis terkait dengan Bioskop Dewi, seperti artikel koran, laporan resmi, dan foto. Selanjutnya, melakukan wawancara dengan individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung tentang Bioskop Dewi, seperti bioskop dan penduduk lokal. Dan terakhir observasi lapangan, melakukan



kunjungan ke lokasi Bioskop Dewi di Kota Makassar untuk melakukan observasi lapangan.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis teks kualitatif. Peneliti akan mencari tema dan pola dalam data, dan menggunakan temuan ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Selain itu, untuk memastikan validitas penelitian, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggunakan berbagai sumber dan metode untuk mengumpulkan data. Peneliti juga akan mencari umpan balik dari rekan sejawat dan ahli dalam bidang hiburan dan sejarah bioskop Indonesia.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulis akan lebih mudah menguraikan dan menjelaskan tulisan ini secara sistematis, runut, dan menjadi satu kesatuan guna untuk membuat sebuah pengklasifikasian yang mempunyai koheren antar bagian satu dengan bagian-bagian lain. Maka penulisan ini akan dibagi menjadi lima bagian atau bab, sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan, yang didalamnya terdiri dari beberapa sub-bab yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi penjelasan mengenai berisi tentang bagaimana perkembangan hiburan modern di kota makassar, mulai dari transformasi kota makassar, kondisi sampai demografi dalam arus hiburan modern.



BAB III berisi tentang awal masuknya bioskop di Indonesia, kemudian meluas ke Kota Makassar sampai bagaimana perkembangan Bioskop Dewi Kota Makassar dan terkenal dikalangan masyarakat.

BAB IV akan menjelaskan dampak keberadaan Bioskop Dewi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Makassar selama masa kejayaanya

BAB V berisi kesimpulan, bagian ini menjelaskan ringkasan dari berdasarkan penelitian yang dibuat.



BAB II

KOTA MAKASSAR DALAM ARUS HIBURAN MODERN

2.1. Tranformasi Kota Makassar

Sebuah kota dapat dikatakan berkembang dalam aspek hiburan ketika mampu menyediakan beragam pilihan fasilitas dan aktivitas rekreasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat modern.²² Hal ini tercermin dari keberadaan pusat-pusat hiburan seperti mall yang dilengkapi bioskop dengan teknologi terkini, arena permainan interaktif, dan area bermain anak yang modern. Selain itu, berkembangnya tempat-tempat hiburan lain yang nyaman untuk melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari seperti kafe, hotel ataupun yang lainnya juga menjadi indikator perkembangan kota dalam aspek hiburan.

Perkembangan aspek hiburan di sebuah kota sangat terkait dengan munculnya berbagai tempat hiburan modern yang mencerminkan kemajuan teknologi dan perubahan preferensi masyarakat dalam mencari kesenangan. Hadirnya pusat perbelanjaan modern atau mall yang dilengkapi dengan bioskop, arena permainan digital, dan food court telah mengubah cara masyarakat menikmati waktu luang mereka. Selain itu, pembangunan taman hiburan tematik, wahana permainan indoor dengan teknologi virtual reality, serta venue pertunjukan seni modern juga telah memberikan dimensi baru dalam lanskap hiburan perkotaan.



Jamaludin. A. N, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan itikanya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 85.

Keberadaan tempat-tempat hiburan modern ini tidak hanya berdampak pada gaya hidup masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian kota melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata. Hal ini juga mendorong pertumbuhan bisnis pendukung seperti hotel, restoran, toko retail, dan jasa transportasi yang semuanya membayar pajak dan retribusi ke daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi ini secara keseluruhan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi.²³ Perkembangan ini mencerminkan transformasi kota menjadi ruang urban yang lebih dinamis dan menawarkan berbagai pilihan hiburan yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat.

Kota Makassar, dulu dikenal sebagai Ujung Pandang, memiliki sejarah yang kaya dan Panjang. Kota ini awalnya berkembang sebagai pusat perdagangan pada abad ke-16, ketika Kerajaan Gowa bersatu dengan Kerajaan Tallo. Pada masa itu, Kota Makassar menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di Asia Tenggara, dengan banyak saudagar dari berbagai daerah datang untuk berdagang.²⁴

Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan di Indonesia. Sebagai kota terbesar di wilayah timur Indonesia, Kota Makassar memainkan peran penting sebagai pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan di kawasan tersebut. Kota ini

²³ Athazir Setiawan, “Peranan Bioskop Di Surabaya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 1968-1987”, *Jurnal Avatara*, Vol. 4 No. 3, hlm. 714.

Rasjid. A & Gunawan R, *Makassar sebagai kota maritim*, (Jakarta: Ditjen Jenderal Kebudayaan, 2000), hlm. 53.



terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, menghadap ke Selat Makassar yang memisahkan Pulau Sulawesi dengan Pulau Kalimantan di sebelah barat.

Kota Makassar mulai berdiri sebagai ibukota kerajaan yang tumbuh menjadi kawasan perdagangan sejak masa pemerintahan raja Gowa yang ke-9, yaitu Tumaparissi Kallonna pada tahun 1510-1546.²⁵ Awalnya, kota dan bandar Makassar terletak di muara Sungai Tallo, dengan pelabuhan niaga kecil pada penghujung abad ke-15. Pada pertengahan abad ke-16, Tallo bersatu dengan Kerajaan Gowa, dan mulai melepaskan diri dari Kerajaan Siang. Perpindahan bandar ke muara Sungai Jeneberang dan pembangunan benteng Somba Opu menandai perkembangan wilayah inti Kota Makassar.²⁶

Pertumbuhan kota ditandai dengan kawasan kota tersebut ramai dikunjungi, baik dari lokal maupun mancanegara. Salah satu modal pertama Kota Makassar untuk berkembang adalah menjadikan jalur perdagangan strategis dengan pelabuhan internasional di Sulawesi Selatan pada abad 16 sampai pertengahan abad 17, sehingga para pedagang di dunia berdatangan.²⁷ Kemudian, pada masa kolonial Belanda sekitar abad 20 Makassar yang kala itu dikenal sebagai Ujung Pandang

²⁵ Sritimuryati, “Perdagangan Maritim Di Makassar Abad XVI-XVII”, *Jurnal Walasuji*, Vol. 12 No. 2, (2021), hlm. 318.

²⁶ Pemerintah Kota Makassar, “Sejarah Kota Makassar”, <https://makassarkota.go.id/sejarah-kota-makassar/> diakses pada 30 November 2024 pukul 17:49 WITA.

Edward Lamberthus Poelinggomang, *Makassar abad XIX: Studi Tentang Perdagangan Maritim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002),



mulai mengenal bentuk-bentuk hiburan modern seiring dengan masuknya pengaruh Eropa. Bioskop menjadi salah satu hiburan modern pertama yang masuk ke kota ini

Pada awal abad ke-20 hingga setelah kemerdekaan, Kota Makassar mengalami transformasi kemodernan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah tempat hiburan, sehingga terjadi urbanisasi dari desa ke kota. Dengan kehadiran Belanda, modernitas adalah sesuatu yang sangat berkaitan dan mempunyai pengaruh dengan Kota Makassar seperti perencanaan tata kota. Sebagai contoh mulai dibangunnya tempat wisata, mall, perumahan, hotel dan bioskop.²⁸

Kemudian pada tahun 1950-an pasca kemerdekaan Indonesia, transformasi kota Makassar menjadi kota modern diwarnai dengan kekacauan sosial yang signifikan. Salah satu kekacauan terbesar terjadi saat gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pimpinan Kahar Muzakkar yang menciptakan ketegangan di Makassar antara tahun 1950-1965. Kekacauan ini menyebabkan terganggunya aktivitas perdagangan dan kehidupan sosial masyarakat, dimana banyak pedagang dari daerah pedalaman Sulawesi Selatan yang takut membawa barang dagangan mereka ke Makassar karena ancaman perampokan dan pajak ilegal yang dipungut oleh kelompok pemberontak. Situasi ini diperparah dengan munculnya



Ilham Daeng Makkelo, “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota ‘pada Abad ke-20’”, *Jurnal Sejarah*, Vol. 1 No. 2, (2018), hlm. 49-50.

kelompok-kelompok pemuda yang memanfaatkan situasi tidak stabil untuk melakukan tindak kriminal di berbagai sudut kota.²⁹

Setelah pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar, hubungan antara masyarakat Makassar dan pemerintah Indonesia mengalami perubahan signifikan. Pada awalnya, banyak masyarakat Makassar yang mendukung pemberontakan karena mereka merasa tidak puas dengan pemerintahan pusat yang mereka anggap tidak adil dan tidak memperhatikan kebutuhan daerah. Namun, setelah pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh TNI pada tahun 1965, hubungan antara masyarakat Makassar dan pemerintah pusat mulai membaik.³⁰

Pada masa pemerintahan Orde Baru yang menasbihkan diri sebagai Orde Pembangunan, diterapkan Trilogi Pembangunan yang mencakup tiga aspek utama, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³¹ Dalam konteks pemerataan pembangunan, perhatian juga diberikan pada distribusi dan aksesibilitas fasilitas hiburan seperti bioskop ke berbagai wilayah kota. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa

²⁹ Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: dari Tradisi ke DI/TII*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 174.

³⁰ Yuda Prinada, “Pemberontakan DI-TII Kahar Muzakkar: Sejarah, Kronologi, Penumpasan”, <https://tirto.id/pemberontakan-di-tii-kahar-muzakkar-kronologi-penumpasan-gaQ5/> diakses pada 23 Desember 2024 pukul 15:19



Dwi Wahyono Adi, “Propaganda Orde Baru 1966-1980”, *Jurnal Verleden*, j. 1, (2012), hlm. 47.

perkembangan industri hiburan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di pusat kota atau Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau daerah-daerah lain di luar wilayah tersebut.

Agar pemerataan pembangunan dapat terwujud, pembangunan di wilayah Kota Makassar dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Dengan dasar tersebut, pemerintah kota menyusun *Master Plan* pembangunan sebagai pedoman dalam menata wilayah kota. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengharapkan adanya perubahan signifikan di berbagai aspek wilayah Kota Makassar guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Program pembangunan yang disusun berdasarkan landasan konstitusional pertama kali diwujudkan melalui Pola Pembangunan Lima Tahun Kota Makassar, yang dikenal dengan nama Program 3K, yakni upaya untuk menghapuskan Kemiskinan, Kemelaratn, dan Kebodohan. Dengan teratasinya ketiga permasalahan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan perubahan positif melalui peningkatan kesempatan kerja, kemajuan perekonomian, serta pembangunan fasilitas umum di berbagai lokasi. Program ini dilaksanakan dalam jangka waktu cukup panjang, yaitu sejak tahun 1965 hingga 1970.³²

Untuk mencapai tujuan dari program tersebut, pemerintah Kota Makassar pada masa itu juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan penduduk melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang dikenal dengan konsep "6 Cukup". Enam aspek

akusd meliputi: cukup lapangan kerja, cukup perumahan, cukup air minum

Abdurrazaq Mattaliu dan Andhy Pallawa, *H.M. Dg. Patompo: Biografi an*, (Ujung Pandang: Yayasan Pembangunan Indonesia, 1997), hlm. 47.



dan listrik, cukup pendidikan dan kesehatan, cukup sarana perhubungan dan transportasi, serta cukup hiburan dan olahraga.³³

Dalam aspek hiburan, berbagai fasilitas di dalam kota mulai dikembangkan, salah satunya adalah sarana hiburan seperti bioskop, pertunjukan musik, dan siaran televisi. Kehadiran bioskop dan bentuk hiburan modern lainnya menjadi penanda meningkatnya aktivitas budaya masyarakat perkotaan. Geliat modernitas pun semakin terasa seiring waktu, ditandai dengan meningkatnya kualitas dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kota yang mencerminkan kemajuan dalam pembangunan wilayah perkotaan.

Pemerintah pusat mulai melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat Makassar, termasuk dengan memberikan dukungan ekonomi dan infrastruktur. Salah satu langkah lain yang diambil adalah dengan memperkenalkan program "Kota 5 Dimensi" oleh Kolonel Muhammad Daeng Patompo, yang bertujuan untuk menjadikan Makassar sebagai kota dagang, budaya, industri, akademik, dan pariwisata.

Tujuan dari dimensi Kota Budaya, Patompo menekankan pentingnya revitalisasi ruang-ruang publik sebagai wadah bagi kegiatan seni dan budaya, termasuk pembangunan tempat pertunjukan serta dukungan terhadap industri hiburan seperti bioskop.³⁴ Ia juga mendorong penguatan perfilman nasional, sejalan dengan



Muhammad Daeng Patompo, *Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen Pembangunan)*, (Ujung Pandang: Percetakan SMP Frater, 1976), hlm. 30.

Ibid, hlm. 33.

kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan bioskop menayangkan film-film dalam negeri guna membangun industri kreatif yang lebih mandiri.³⁵ Sejalan dengan pencapaian dimensi Kota Pariwisata, peningkatan infrastruktur penunjang wisata turut menjadi prioritas, yang mencakup pembangunan jalan, hotel, transportasi umum, tempat hiburan, dan fasilitas umum lain.

Program tersebut berhasil menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya di Kota Makassar, serta mendorong transformasi kota menuju arah yang lebih modern. Selain itu, pemerintah berupaya mengintegrasikan kawasan permukiman seperti kampung-kampung ke dalam pengembangan pusat kota, disertai dengan perbaikan fasilitas umum guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dengan berbagai langkah tersebut, bentuk hiburan yang disajikan di Kota Makassar terus berkembang mengikuti kebutuhan dan selera masyarakat. Hubungan antara masyarakat Makassar dan pemerintah pusat pun semakin harmonis, yang turut mendorong pertumbuhan Kota Makassar sebagai kota modern yang lebih maju. Upaya-upaya tersebut juga secara bertahap menjadikan Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia.



SM Ardan, *Dari Gambar Idoep ke Sineplek*, (Jakarta: GPBSI, 1992), hlm.

2.2. Letak Geografis Kota Makassar

Secara geografis wilayah Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar.³⁶ Kota Makassar terbentuk sebagai suatu daerah otonom berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94) Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.³⁸ Kota Makassar sendiri memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat

³⁶ Pemerintah Kota Makassar, "Geografis", <https://makassarkota.go.id/geografis-2/> diakses pada 24 Desember 2024 pukul 16:03 WITA.



³⁷ Amri, "Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam 1g Terwujudnya Makassar Sebagai Smart City", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 5 No. 2, (2016), hlm. 438.

Ibid

175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang. Di sebelah utara, Kota Makassar berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, dan sebelah Barat berbatasan Selat Makassar. Pada awal perkembangannya, kota ini mengalami pemekaran wilayah dengan luas 2.499 hektare dan jumlah penduduk sebanyak 438.809 jiwa, yang tersebar di delapan kecamatan: Makassar, Mariso, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Mamajang, Bontoala, Wajo, dan Tallo.³⁹

Kota Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga posisinya sangat strategis sebagai pintu gerbang wilayah Indonesia Timur. Letak ini membuat Makassar berkembang pesat, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dalam bidang hiburan modern seperti bioskop. Akses jalan yang baik, dekat dengan pelabuhan, dan lokasinya yang berada di pusat aktivitas kota ikut mempercepat penyebaran film dan pembangunan bioskop di berbagai tempat. Urbanisasi yang cepat, jumlah penduduk yang padat, dan tingginya mobilitas masyarakat membuat Makassar menjadi salah satu kota penting dalam pertumbuhan budaya menonton film di luar Pulau Jawa.



Aryanto. dkk, “Perkembangan Struktur Ruang di Kota Makassar”, *Jurnal dan Kota Maritim*, Vol. 1 No. 1, (2013), hlm. 28.

Kota Makassar pada tanggal 31 Agustus 1971 kembali berubah nama kembali menjadi Ujung Pandang.⁴⁰ Kemudian wilayah Kota Makassar diperluas. Perluasan wilayah Kota Makassar juga dibuktikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang “Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan”. yang ditetapkan pada tanggal 1 September 1971.⁴¹

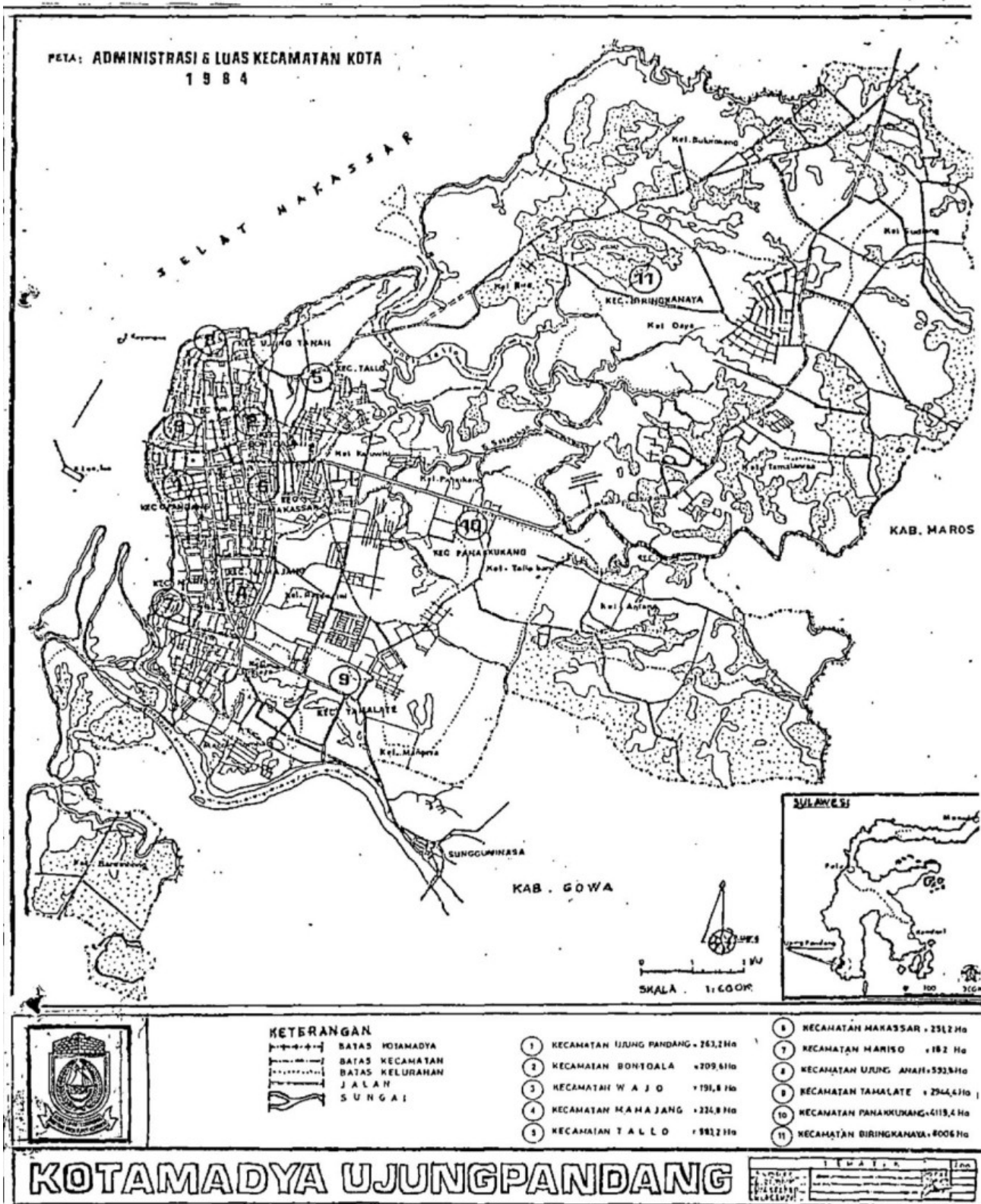
Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut, Kota Makassar diperluas dengan memasukan beberapa daerah dari 3 kabupaten. Pertama, Kabupaten Gowa yang meliputi desa Barombong, Karuwisi, Panaikang, Tello Baru, Antang, Tamangappa, Jongaya, Rappocini, Maccini Sombala, dan Mangasa. Kedua, Kabupaten Maros yang meliputi daerah Bira, Daya, Tamalanrea, Bulurokeng dan Sudiang. Ketiga, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi desa Barrang Cadi, Barrang Lompo, dan Kodingareng.⁴²

⁴⁰ Nurhikmah. dkk, “Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pad Di Wilayah Kecamatan Manggala Kota Makassar”, *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, Vol. 3 No. 5, (2022), hlm. 871.

⁴¹ Akhmad Akbar Abdullah. dkk, “Perpindahan Karena Perluasan: Masuknya dalam Wilayah Kota Makassar 1971”, *Jurnal Pattingalloang*, Vol. 5 No. 4, lm. 15

Ibid





Gambar 2. 1 Peta Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1984

Sumber: <https://perpustakaan.bps.go.id/>



Peta Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1984 diatas menampilkan beberapa wilayah kecamatan, serta batas wilayah Kota Makasar. Beberapa wilayah kecamatan yang disebutkan terdapat 11 kecamatan tersebar di kawasan Administratif Kotamadya Ujung Pandang seperti Kecamatan Tamalate terdapat dibagian selatan Kota Makassar, Kecamatan Makassar yang berada di tengah-tengah kota. Kemudian diikuti, Kecamatan Ujung Pandang yang terletak disampingnya merupakan ibukota kodya pada saat itu, Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Mariso dan Mamajang berada dibagian barat, dibagian timur terdapat Kecamatan Panakkukang, terakhir Kecamatan Biringkanya dan Kecamatan Tallo berada dibagian utara Kota Makassar.

Setelah perluasan wilayah Kota Makassar, sejak tahun 1972 tercatat persentase penggunaan lahan di masing-masing kecamatan menunjukkan dominasi penggunaan untuk kebutuhan perumahan, diikuti oleh pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, keamanan, tempat ibadah, perkantoran, tempat hiburan, dan sektor lainnya. Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Bontoala menunjukkan dominasi yang signifikan dalam beberapa sektor tersebut. Khusus pada sektor hiburan modern seperti bioskop, hanya kedua kecamatan tersebut yang tercatat mengalami perkembangan, dengan persentase penggunaan lahan untuk bioskop



masing-masing sebesar 1,09% di Kecamatan Bontoala dan 3,91% di Kecamatan Wajo.⁴³

Dalam wilayah administrasi tersebut juga, setiap kecamatan memiliki Ibukota kecamatannya. Kecamatan Mariso di Ibukota Kelurahan atau Desa Mattoangin, Kecamatan Mamajang Ibukota Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Makassar di Merdekaya, Kecamatan Ujung Pandang berada di Kelurahan Baru, Kecamatan Wajo di Ibukotai Melayu, Kecamatan Bontoala di Wajo Baru, Kecamatan Tallo di Rappo Jawa, Kecamatan Ujung Tanah di Pattingalloang, Kecamatan Panakkukang di Panaikang, Kecamatan Tamalate berada di Mangasa dan Kecamatan Biringkanya di Daya.⁴⁴

Dan memasuki periode 1990-an, Kota Makassar yang saat itu masih bernama Ujung Pandang mengalami perubahan geografis yang cukup signifikan akibat dari perluasan wilayah perkotaan. Perluasan wilayah dan pembangunan kota mendorong terjadinya alih fungsi lahan, dari kawasan terbuka hijau yang luas, kemudian menjadi tempat-tempat komersil, pusat perdagangan, maupun untuk kawasan sosial.⁴⁵ Tetapi, dari perluasan wilayah tersebut, Kota ini tetap menjadi pusat ekonomi dan

⁴³ W Donald McTaggart, “Kebijaksanaan Pembangunan Kota di Indonesia: Kasus Ujung Pandang, Sulawesi Selatan”, *Masyarakat Indonesia*, Vol. 3 No. 1, (1976), hlm. 85



⁴⁴ BPS, *Kotamadya Ujung Pandang dalam angka 1983*, (Ujung Pandang: Statistik Kotamadya Ujung Pandang, 1984), hlm. 3

Rosmini Maru. dkk, “Perubahan Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 0”, *Jurnal Sainsmat*, Vol. 4 No. 2, (2015), hlm. 114

pemerintahan di Indonesia bagian timur, dengan wilayah pesisir yang terus berkembang sebagai kawasan bisnis dan pariwisata. Pada tanggal 13 Oktober 1999 nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999.⁴⁶

2.3. Penduduk Kota Makassar

Dinamika kependudukan Kota Makassar telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa kolonial hingga era modern., pertumbuhan penduduk Makassar tidak terlepas dari perannya sebagai kota pelabuhan yang menjadi tujuan migrasi berbagai etnis, termasuk Bugis, Toraja, Mandar, dan Makassar.⁴⁷ Hal ini menciptakan karakteristik demografis yang beragam dan membentuk identitas Makassar sebagai kota multi-etnis.

Perkembangan demografis Kota Makassar juga ditandai dengan perubahan struktur mata pencaharian penduduk. Transformasi ini bergerak dari dominasi sektor maritim dan perdagangan tradisional menuju diversifikasi lapangan kerja yang lebih kompleks, mencakup sektor jasa, industri, dan perdagangan modern. Perubahan ini membawa dampak signifikan pada pola pemukiman, stratifikasi sosial masyarakat

⁴⁶ Jumardi, “Situs Benteng Fort Rotterdam Sebagai Sumber Belajar Dan Pariwisata Kota Makassar : Tinjauan Fisik Arsitektur dan Kesejarahan”, *Indrasangkala*, Vol. 4 No. 2, (2018), hlm. 138

H Lebba Kadorre Pongsibanne, *Islam dan budaya lokal: kajian agi agama*, (Jakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), hlm. 32



dan budaya.⁴⁸ Selain itu, sektor hiburan modern seperti bioskop mempengaruhi orang-orang untuk migrasi, melakukan bisnis serta wisata. Hal ini juga menandai perubahan signifikan dalam pola sosial masyarakat Kota Makassar menjadi gaya hidup modern.⁴⁹

Aspek lain yang menarik dari kondisi penduduk Makassar adalah tingkat urbanisasi yang tinggi. Urbanisasi ini didorong oleh posisi Makassar sebagai pusat pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan di kawasan Indonesia Timur. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk, tetapi juga berdampak pada perubahan sosial-budaya masyarakat, termasuk pola hidup, sistem nilai, dan interaksi sosial.

Awal pertumbuhan penduduk Kota Makassar dapat dikatakan signifikan, karena beberapa faktor utama dari teori yang telah disebutkan, seperti peningkatan kelahiran dan urbanisasi (migrasi). Posisi Kota Makassar yang berada di pesisir barat daya Sulawesi dengan topografi relatif datar memudahkan pembangunan permukiman dan infrastruktur, sehingga mendukung pertambahan penduduk baik secara alami maupun migrasi. Kota Makassar juga adalah Ibu kota Provinsi Sulawesi



⁴⁸ St Asnaeni, “Perubahan Sosial Ekonomi Komunitas Nelayan Di Kelurahan rrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”, *Jurnal Keguruan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, (2014), hlm. 74

Ilham, *Menjadi Kota Modern.....*, hlm. 52

Selatan yang merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur.

Pada masa lampau pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur.⁵⁰

Tabel 2. 1 Data Penduduk Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	1961	384.159 jiwa
2	1971	437.658 jiwa
3	1981	709.157 jiwa
4	1991	907.320 jiwa

Sumber: Biro Pusat Statistik Tahun 1962, 1974, 1983 dan 1993

Kondisi penduduk Kota Makassar pada tahun 1960an meningkat pesat dan lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota. Dengan berjumlah dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang.⁵¹ Menurut data BPS, pada tahun 1961 jumlah penduduk Kota Makassar tepatnya berjumlah 384.159 ribu jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki 194.851 orang dan 189.308 perempuan.⁵² Selama periode ini, Kota Makassar menjadi tujuan utama migrasi masuk dari berbagai daerah

⁵⁰ Akhmad Akbar. dkk, *Perpindahan Karena Perluasan.....*, hlm. 10

⁵¹ Pemerintah Kota Makassar, “Sejarah Kota Makassar”, <http://makassarkota.go.id/sejarah-kota-makassar/> diakses pada 30 November 2024 49 WITA.

Biro Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 1961 Republik Indonesia*, (Jakarta: Biro Statistik Kabinet Menteri Pertama), 1962, hlm. 10



Sulawesi Selatan dan sekitarnya, yang meningkatkan jumlah penduduk secara signifikan.⁵³ Contohnya, banyak dari pedesaan meninggalkan kampung halamannya dan akhirnya pindah ke Kota Makassar. Karena pada tahun 1950-1960an, Indonesia khususnya Sulawesi Selatan disibukkan dengan meluasnya operasi militer dan terjadinya pemberontakan.⁵⁴

Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Makassar menyebabkan ruang kota berkembang secara tidak terkendali. Pertumbuhan kota pada masa itu terutama didorong oleh arus urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah ke kota. Perpindahan ini umumnya terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam ekosistem sosial dan ekonomi di daerah asal, seperti kurangnya lapangan kerja, fasilitas pendidikan, atau akses layanan publik yang memadai. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam struktur wilayah dan mendorong terbentuknya adaptasi ekologis baru bagi penduduk yang bermigrasi ke kawasan perkotaan.⁵⁵ Menanggapi kondisi ini, Wali Kota Makassar saat itu, Dg. Patompo, mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan untuk menata ruang kota secara lebih terencana serta mengendalikan dinamika sosial masyarakat demi menciptakan kehidupan kota yang tertib, sejahtera, dan nyaman bagi seluruh warganya.

⁵³ Dias Pradadimara, “Dari Makassar Ke Makassar: Aspek Demografi dan Politik Proses ‘Etnisasi’ Sebuah Kota”, *Jurnal Populasi*, Vol. 14 No. 1, (2003), hlm.

86



Selfia Agustina. dkk, “Antropologi Suku Bugis”, *Jurnal Wilayah dan Kota* Volume. 5 No. 2, (2024), hlm. 74.

Jamaludin, *Sosiologi perkotaan*....., hlm. 46-46.

Memasuki masa kepemimpinan Walikota H.M. Daeng Patompo era tahun 1970an, terjadi pula perubahan signifikan dalam pola pemukiman penduduk. Perluasan wilayah administratif kota yang ditandai dengan perubahan nama menjadi Ujung Pandang pada tahun 1971 diikuti dengan pembangunan kawasan permukiman baru di wilayah pinggiran.⁵⁶ Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971.⁵⁷ Selain itu, pengembangan infrastruktur dan jalan raya, turut mendukung peningkatan jumlah penduduk. Dapat dibuktikan dari tabel diatas, penduduk Kota Makasar pada periode ini mencapai sebanyak 437.658 jiwa.

Kemudian tahun 1980an mengalami peningkatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sebanyak 709.157 jiwa. Laju pertumbuhan ini mencapai 5,52 persen.⁵⁸ Oleh karena itu, Kota Makassar menghadapi tantangan baru dalam mengelola pertumbuhan penduduk yang cepat. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan perumahan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pemerintah Kota Makassar mulai mengembangkan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah ini, termasuk peningkatan kapasitas infrastruktur dan pengembangan kawasan perumahan baru. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya pendidikan di kawasan perumahan sekitar tahun 1980an.⁵⁹

⁵⁶ Akhmad Akbar. dkk, *Perpindahan Karena Perluasan.....*, hlm. 16

⁵⁷ *Ibid.*

Pradadimara, *Dari Makassar Ke Makassar.....*, hlm. 91

Ibid, hlm. 145



Pertumbuhan penduduk di Kota Makassar terus meningkat disetiap tahunnya. Dari tabel diatas membuktikan angka pertumbuhan penduduk kota semakin tinggi. Memasuki tahun 1990an laju pertumbuhan penduduk kota menurun hanya mencapai 907.320 jiwa, meskipun begitu angka pertumbuhan kota tetap tinggi, laju pertumbuhan penduduk kota hanya mencapai 2,9 persen. Hal ini ditandai dengan Perbaikan infrastruktur jalan raya antarkota yang semakin baik, serta ketersediaan angkutan penumpang seperti pete-pete dalam jumlah yang melimpah, telah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat antara Kota Makassar dan daerah sekitarnya. Kondisi ini mempercepat arus migrasi sirkuler, di mana penduduk secara rutin berpindah untuk bekerja, berdagang, atau mengakses layanan di kota, tanpa menetap secara permanen. Selain itu, mobilitas ulang-alik juga semakin tinggi, memungkinkan masyarakat yang tinggal di luar Makassar untuk melakukan perjalanan harian guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial mereka.⁶⁰

Hingga akhir abad ke-20, Kota Makassar mengalami perubahan sosial dan budaya yang cukup signifikan. Komposisi penduduk yang awalnya didominasi oleh etnis lokal seperti Bugis, Mandar, dan Toraja.⁶¹ Selain itu, kota ini juga menjadi tempat tinggal bagi kelompok etnis lainnya seperti Jawa, Madura, Minangkabau, Sumba, Sumbawa, Manado, dan Banjar, serta warga keturunan asing seperti Cina, Arab, Pakistan, dan Belanda. Keberagaman etnis ini secara langsung berkaitan



Ibid, hlm. 91

Ibid, hlm. 89.

dengan pola pekerjaan dan pembagian peran sosial, di mana masing-masing kelompok etnis cenderung memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang ekonomi, perdagangan, maupun jasa, yang turut membentuk dinamika sosial Kota Makassar.

Keberadaan masyarakat etnis Banjar di Kota Makassar umumnya terlihat dalam sektor perdagangan, terutama sebagai pedagang perhiasan dan penyedia jasa pertukangan serta penjahitan. Sementara itu, kelompok etnis Arab, India, dan Pakistan mayoritas bergerak dalam bidang perdagangan kain, rempah-rempah, minyak wangi, obat-obatan, dan alat olahraga. Etnis Tionghoa (Cina) banyak berperan sebagai pedagang perantara hasil bumi, pedagang kelontong, serta pelaku usaha dalam bidang pertukaran barang. Masyarakat etnis Jawa umumnya membuka usaha kuliner, sedangkan etnis Timor, Buton, Jawa, dan Toraja banyak yang bekerja sebagai buruh. Pembagian peran ini menunjukkan bagaimana keberagaman etnis turut membentuk struktur sosial dan ekonomi Kota Makassar.⁶²

Namun, pada tahun 1995 menunjukkan bahwa sebesar 42,8 persen migran yang masuk ke Kota Makassar melakukannya dengan alasan untuk menempuh pendidikan. Sementara itu, sebesar 21,8 persen migran datang karena mengikuti pasangan, orang tua, atau anak. Hanya 11,5 persen migran yang pindah ke kota ini dengan tujuan mencari pekerjaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pada masa



Anwar Arifin, *Pergulatan Politik di Makassar 1945-1966*, (Jakarta: Pustaka 19), hlm. 19.

tersebut, Kota Makassar lebih dikenal sebagai pusat pelayanan pendidikan dibandingkan sebagai wilayah yang menawarkan peluang kerja yang luas.⁶³

Keberagaman etnis juga menciptakan kekayaan budaya yang lebih beragam di kota, namun menimbulkan tantangan dalam menjaga harmoni sosial dan integrasi antar etnis. Maka dari itu, peran hiburan modern seperti bioskop, sangat dibutuhkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan saja, tetapi juga menjadi ruang sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dan etnis di Makassar. Hal ini berkontribusi pada pembentukan identitas urban modern masyarakat Makassar dan menjadi perubahan sosial-budaya di kota ini.

Secara keseluruhan, dari tahun 1960-an hingga 1990-an, Kota Makassar mengalami transformasi besar dalam kondisi penduduknya, dari aspek demografi, ekonomi, infrastruktur, hingga sosial dan budaya. Perubahan ini mencerminkan perkembangan yang dinamis dan kompleks dari sebuah kota yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan dan peluang yang ada.



Thoman Pardosi. dkk, *Profil Migran Masuk di Enam Kota Besar: Hasil Urbanisasi 1995*, dalam Dias Pradadimara, “Dari Makassar Ke Makassar: Demografi dan Politik Proses ‘Etnisasi’ Sebuah Kota”, *Jurnal Populasi* , Vol. (2003), hlm. 92